



# DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BATU BARA

## RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh Kota kabupaten Batu  
Bara

Email : [dinkesbb@gmail.com](mailto:dinkesbb@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, diharapkan mampu menjawab tantangan dalam pembangunan kesehatan sehingga tercapailah visi dan misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara untuk mewujudkan Masyarakat Batu Bara yang Mandiri Dalam Hidup Sehat.

Lima Puluh, 4 Februari 2022





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah,

Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja

Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu menyusun dokumen Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun kedepan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Utara 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Batu Bara 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020–2040;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2015-2025;
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara merupakan lembaga Unsur Organisasi Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi dan Misi Bupati Batu Bara. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Kesehatan, hingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan

- bidang Kesehatan Kabupaten Batu Bara;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
  3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara setiap tahunnya;
  4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara ;dan
  5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 - 2023  
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2023. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Memberikan landasan penyusunan KUA dan PPAS tahun 2023 dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2023;
2. Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat;
3. Sebagai dasar bagi seluruh pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing bidang.
4. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2023;
5. Memastikan bahwa APBD tahun 2023 disusun berlandaskan RKPD Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,

Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah ;  
Khusus Kabupaten, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian SDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Batu Bara Nama Perangkat Daerah

#### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II.**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

*Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2023. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka

perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021 (terlampir).



**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Tingkat Realisasi	Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021			Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2021					Realisasi Capaian Program dan Realisasi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian realisasi Target Renstra		
1	2	3	4	5	6			7			8			9	10	11
					K	%	Rp	K	%	Rp		%				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENCAPAIAN PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100		100	%	58.727.905.646	99	%	58.024.887.558	98,80	%	98,80	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan data dan informasi yang disusun	2		2	dokumen	89.372.601	2	dokumen	72.435.000	100,00	%	81,05	2	2	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan data dan informasi yang disusun	2		2	dokumen	89.372.601	2	dokumen	72.435.000	100,00	%	81,05	4	4	200

	Perangkat Daerah															
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN</b>	12	12	bulan	51.043.087.679	12	bulan	50.684.084.465	100,00	%	99,30	12	12	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	12	bulan	51.043.087.679	12	bulan	50.684.084.465	100,00	%	99,30	12	12	100	
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	-	1	Orang	-	0,00	orang	-	0,00	%	0,00	0	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya manusia yang dilatih	-	1	orang	-	0,00	orang	-	0,00	%	0,00	0	0		
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Waktu Pembayaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia</b>	12	12	bulan	1.063.769.725	12	bulan	1.017.585.025	100,00	%	95,66	12	12	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Pembayaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	12	12	bulan	24.997.188	12	bulan	24.739.762	100,00	%	98,97	12	12	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	41	41	jenis	270.403.799	41	jenis	267.820.259	100,00	%	99,04	41	41	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Pembayaran Peralatan Rumah	12	12	bulan	65.992.985	12	bulan	65.949.113	100,00	%	99,93	12	12	100	

		Tangga yang Tersedia														
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12		12	bulan	27.498.638	12	bulan	27.149.550	100,00	%	98,73	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12		12	bulan	88.248.529	12	bulan	84.973.298	100,00	%	96,29	12	12	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis penyediaan Jurnal/Surat kabar yang disediakan	3		3	jenis	15.020.000	3	jenis	15.010.000	100,00	%	99,93	3	3	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggarakan	12		12	bulan	571.608.586	12	bulan	531.943.043	100,00	%	93,06	12	12	100
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.739.290.641</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>1.654.650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>95,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			8	Unit	1.687.240.350	8	unit	1.602.650.000	100	%	94,99			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			17	Unit	51.000.000	17	unit	51.000.000	100	%	100,00			

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan			2	jenis	1.050.291	2	jenis	1.000.000	100	%	95,21			
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>			<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>4.032.750.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>3.860.864.654</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>95,74</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	12		12	bulan	1.107.800.000	12	bulan	1.039.533.800	100,00	%	93,84	<b>12</b>	12	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12		12	bulan	210.684.000	12	bulan	203.792.460	100,00	%	96,73	<b>12</b>	12	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	12		12	bulan	2.714.266.000	12	bulan	2.617.538.394	100,00	%	96,44	<b>12</b>	12	<b>100</b>
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu pembaruan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terpelihara</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>559.635.000</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>537.266.414</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>96,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	12		12	bulan	111.420.000	12	bulan	107.158.241	100,00	%	96,18	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12		12	bulan	448.215.000	12	bulan	430.108.173	100,00	%	95,96	12	12	100
8	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Presentase Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang melaksanakan SPM</b>	100		100	%	200.000.000	100	%	198.002.000	100,00	%	99,00	0	0	-
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dinas Kesehatan)	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dianggarkan	4		4	Faskes	200.000.000	4	Faskes	198.002.000	100,00	%	99,00	0	0	-
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>PERSENTASE TERCAPAINYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	100		100	%	89.340.728.633	81,65	%	72.950.926.497	81,65	%	81,65	100	100	100

<b>1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencapaian Kegiatan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kabupaten Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>26.445.828.102</b>	<b>94,07</b>	<b>%</b>	<b>23.148.822.327</b>	<b>94,07</b>	<b>%</b>	<b>87,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang dibangun		2	pustu	788.000.000	2	pustu	772.770.209	100,00	%	98,07			
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan administrasi RSUD	<b>4</b>	3	kegiatan	3.002.229.870	2	kegiatan	1.737.724.223	66,67	%	57,88	<b>4</b>	4	<b>100</b>
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Ramah anak	<b>15</b>	15	Puskesmas	64.660.723	15	Puskesmas	64.266.500	100,00	%	99,39	<b>15</b>	15	<b>100</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang di lakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	<b>6</b>	1	Rumah sakit	482.250.000	1	RS	479.717.000	100,00	%	99,47	<b>6</b>	6	<b>100</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<b>11</b>	2	paket	527.350.000	2	paket	412.228.000	100,00	%	78,17	<b>1</b>	1	<b>9</b>
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	<b>33</b>	4	paket	5.829.031.123	3	paket	5.541.602.052	75,00	%	95,07	<b>33</b>	33	<b>100</b>
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan	<b>187</b>	5	jenis	7.007.659.971	5	jenis	5.926.797.726	100,00	%	84,58	<b>187</b>	187	<b>100</b>

	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase Jumlah paket pengadaan obat, vaksin	5	100	%	4.082.304.286	92,33	%	3.769.065.104	92,33	%	92,33	5	5	100
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Presentase Jumlah pengadaan bahan habis pakai	6	100	%	4.172.735.129	94,88	%	3.959.009.513	94,88	%	94,88	6	6	100
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pendukung pelayanan kesehatan		12	bulan	303.600.000	12	bulan	302.035.000	100,00	%	99,48			
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat yang dikalibrasi	15	1	paket	114.380.000	1	paket	111.980.000	100,00	%	97,90	15	15	100
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Frekuensi Waktu Pendistribusian Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	12	Bulan	71.627.000	12	bulan	71.627.000	100,00	%	100,00	12	12	100
2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>62.216.978.922</b>	<b>96,75</b>	<b>%</b>	<b>49.184.699.170</b>	<b>96,75</b>	<b>%</b>	<b>79,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	Presentase Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar	85	85	%	624.979.681	85	%	616.741.200	100,00	%	98,68	85	85	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	Jumlah Kegiatan ibu bersalin agar mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	2	2	Kegiatan	2.513.239.800	2	Kegiatan	2.194.477.000	100,00	%	87,32	2	2	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan BayiBaru Lahir (Dinas Kesehatan)	Presentase Bayi yang memperoleh pelayanan Neonatal Essensial sesuai standar	85	85	%	151.905.000	85	%	148.905.000	100,00	%	98,03	85	85	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita gizi buruk yang ditangani	100	100	%	712.090.000	100	%	710.890.000	100,00	%	99,83	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	100	100	%	273.432.415	100	%	267.512.500	100,00	%	97,83	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia produktif	100	100	%	26.221.086	100,00	%	26.212.000	100,00	%	99,97	100	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lanjut	100	100	%	171.465.000	100	%	169.665.000	100,00	%	98,95	100	100	100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	Presentase cakupan penemuan dan kesembuhan TBC 80%	38		36,8	%	213.401.672	37	%	122.850.000	100,00	%	57,57	<b>38</b>	38	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	Presentase Kelompok Resiko Tinggi yang di skreening HIV 20%	26		26	%	64.585.000	26	%	64.585.000	100,00	%	100,00	<b>26</b>	26	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	Presentase KLB yang di tangani <24 Jam 100 %	100		100	%	4.922.862.352	100	%	3.735.659.858	100,00	%	75,88	<b>100</b>	100	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	Presentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100		100	%	2.476.216.631	100	%	2.340.812.810	100,00	%	94,53	<b>100</b>	100	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Jumlah kegiatan pengelolaan kesehatan gizi masyarakat	2		2	kegiatan	667.936.651	2	%	666.410.300	100,00	%	99,77	<b>2</b>	2	<b>100</b>

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	Presentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan Olahraga	100	100	%	182.851.073	100	%	162.118.800	100,00	%	88,66	<b>100</b>	100	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Kegiatan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan	3	3	Kegiatan	350.551.827	3	kegiatan	349.266.700	100,00	%	99,63	<b>3</b>	3	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Presentase Puskesmas yang melakukan promosi kesehatan	100	100	%	708.905.379	100	%	703.526.379	100,00	%	99,24	<b>100</b>	100	<b>100</b>
Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Presentase fasyankes yang melaksanakan surveilans kesehatan	100	100	%	113.642.000	100	%	62.195.000	100,00	%	54,73	<b>100</b>	100	<b>100</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan)	Presentase Napza yang ditangani sesuai standar	60	60	%	112.725.000	60	%	112.725.000	100,00	%	100,00	<b>60</b>	60	<b>100</b>
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Rumah yang di fogging	2.600	6400	rumah	1.475.379.496	2600	rumah	1.442.224.814	40,63	%	97,75	<b>2600</b>	2600	<b>100</b>
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI yang di bayarkan jaminan kesehatan	26.177	30000	peserta	31.225.439.895	26177	peserta	27.418.807.804	87,26	%	87,81	<b>26177</b>	26177	<b>100</b>
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah waktu pembayaran jasa pelayanan Non BPJS, pembayaran kasus mis x /mr.x ,pembayaran jasa pelayanan non	12	12	bulan	10.939.500.248	12	bulan	4.349.552.750	100,00	%	39,76	<b>12</b>	12	<b>100</b>

		kapitasi, pengadaan belanja bahan makan minum pasien														
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan yang terlaksana	52		52	kegiatan	3.354.247.000	52	kegiatan	3.070.311.255	100,00	%	91,54	<b>52</b>	52	<b>100</b>
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah waktu pelaksanaan operasional fasilitas kesehatan lainnya	12		12	bulan	434.926.716	12	bulan	405.750.000	100,00	%	93,29	<b>12</b>	12	<b>100</b>
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melakukan akreditasi	10		10	puskesmas	455.775.000	0	puskesmas	-	0,00	%	-	<b>10</b>	10	<b>100</b>
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	Presentase fasyankes yang melaksanakan kegiatan Investigasi Awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100		100	%	44.700.000	97	%	43.500.000	97,32	%	97,32	<b>100</b>	100	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Presentase Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan</b>	100		<b>100</b>	%	<b>199.696.609</b>	<b>100</b>	%	<b>198.320.000</b>	<b>100</b>	%	<b>99,31</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan			1	paket	199.696.609	1	paket	198.320.000	<b>100</b>	%	<b>99,31</b>			

4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jmlah Fasyankes yang di akreditasi			6	Puskesmas	478.225.000	6	Puskesmas	419.085.000	100,00	%	87,63			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Fasyankes yang melakukan peningkatan mutu pelayanan			6	Puskesmas	478.225.000	6	Puskesmas	419.085.000	100,00	%	87,63			
C	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	100		100	%	9.102.167.407	93,75	%	8.714.055.000	100,00	%	95,74	100,00	100	100
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu pembayaran Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia di wilayah Kabupaten/Kota yang Direncanakan	12		12	bulan	8.823.700.000	12	bulan	8.439.525.000	100,00	%	95,65	12	12	100
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah waktu pembayaran Honor Tenaga Kesehatan	12		12	bulan	7.851.700.000	12	bulan	7.719.525.000	100,00	%	98,32	12	12	100

	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	Jumlah waktu Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	12		12	Bulan	972.000.000	12	Bulan	720.000.000	100,00	%	74,07	12	12	100
2	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</b>	100		100	%	278.467.407	100	%	274.530.000	100,00	%	98,59	100	100	100
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Jumlah Tenaga Kontrak dari Dana BOK	45		45	Orang	278.467.407	45	Orang	274.530.000	100,00	%	98,59	45	45	100
D	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>PRESENTASE PENYEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	100		100	%	182.464.481	84	%	152.459.000	100,00	%	83,56	100	100	100
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Kefarmasian yang di lakukan pengawasan	36		36	Sarana Kefarmasian	17.963.975	36	0	14.695.000	100,00	%	81,80	36	36	100

	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Jumlah Farmasi yang di sediakan dan dikelola data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36		36	Sarana Kefarmasian	17.963.975	36	0	14.695.000	100,00	%	81,80	36	36	100
2	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PIRT yang dilaksanakan</b>	1		5	kegiatan	101.019.892	5	kegiatan	80.914.000	100	%	80,10	1	1	100
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan PIRT yang dilaksanakan	1		5	kegiatan	101.019.892	5	kegiatan	80.914.000	100	%	80,10	1	1	100

	Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
3	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Jumlah sarana Industri Rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	30		48	Sarana Industri Rumah Tangga	63.480.614	48	Sarana Industri Rumah Tangga	56.850.000	100,00	%	89,55	30	30	100
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Dinas Kesehatan)	Jmlah Pemeriksaan sarana Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	30		48	Sarana Industri Rumah Tangga	63.480.614	48	Sarana Industri Rumah Tangga	56.850.000	100	%	89,55	30	30	100
E	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>PRESENTASE TERCAPAINYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	100		100	%	870.860.756	100	%	764.029.580	100,00	%	87,73	100	100	100

1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			1	kegiatan	244.460.756	1	Kegiatan	137.629.580	100	%	56,30			
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan			1	kegiatan	244.460.756	1	Kegiatan	137.629.580	100	%	56,30			
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase Honor Kader yang di bayarkan	50		100	%	626.400.000	100	%	626.400.000	100	%	100,00	50	50	100
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Frekuensi waktu pembayaran Honor Kader dalam satu tahun	12	12	12	Bulan	626.400.000	12	Bulan	626.400.000	100	%	100,00	12	12	100

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			158.224.126.923			140.606.357.635				
--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--	--	--	--

**TABEL 2.2**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BATU BARA**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perang kat Daerah) Tahun 2023	Reali sasi Targe t Kinerj a Hasil Progr am dan Kelua ran Kegia tan s/d Tahu n 2020 (tahu nn-3)	Target		Realisasi		Tingkat Realisasi			Target Program dan Kegiatan (Renja Perang kat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					Realisasi Capaian Program dan Realisasi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian realiasa si Target Renstra	
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11	
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.							

A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.271.031.592</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>4.074.025.810</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>95</b>			
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.537.650.867</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>3.447.834.611</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>97</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12	Bulan	3.537.650.867	12	Bulan	3.447.834.611	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>97</b>			
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>220.060.725</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>209.995.334</b>	<b>95</b>	<b>%</b>	<b>95</b>			
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah waktu pengadaan alat tulis kantor yang tersedia			12	Bulan	94.574.324	12	Bulan	90.910.613	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>96</b>			
		Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor yang tersedia			36	Orang/Bulan		36	Orang/Bulan		<b>100</b>					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			12	Bulan	19.986.401	12	Bulan	19.639.100	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98</b>			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan			12	Bulan	20.000.000	12	Bulan	14.810.000	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>74</b>			

		Perundang-undangan														
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang terfasilitasi			12	Bulan	85.500.000	12	Bulan	84.635.621	100	%	99			
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>			100	%	303.400.000	97	%	293.506.001	97	%	97			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia			24	Orang/Bulan	78.000.000	24	Orang/Bulan	78.000.000	100	%	100			
		Jumlah petugas operator komputer dan petugas administrasi perkantoran			60	Orang/Bulan		60	Orang/Bulan		100	%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia			12	Bulan	49.000.000	12	Bulan	39.106.001	100	%	80			
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman tamu yang tersedia			12	Bulan	176.400.000	12	Bulan	176.400.000	100	%	100			
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>			100	%	209.920.000	58	%	122.689.864	58	%	58			

		<b>Pemerintahan Daerah</b>																
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional			47	Unit	175.300.000	32	Unit	88.268.864	68	%	50					
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional dan petugas pengemudi			6	Unit		0	Unit		0	%						
		Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			6	Unit		6	Unit		100	%						
		Jumlah honorarium supir			24	orang/bulan		24	orang/bulan		100	%						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			12	Bulan	14.620.000	12	Bulan	14.440.000	100	%	99					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu bangunan yang di rehab			1	Tahun	20.000.000	1	Tahun	19.981.000	100	%	100					
B	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk</b>			100	%	36.000.000	100	%	36.000.000	100	%						
1	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan</b>			100	%	36.000.000	100	%	36.000.000	100	%	100	100	100			

		daerah kabupaten/kota														
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang didata			2500	K K		0	KK		0	%		2	2	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah honorarium non PNS			36	Oran g/B ulan	36.000.000	36	Orang / Bulan	0	36.000.00	100	%			100
C	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Persentase Terlaksananya Program Pembinaan Keluarga Berencana KB</b>			100	%	5.377.263.000	69	%	3.735.935.388	69	%	69			
1	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penendalian penduduk dan KB</b>			100	%	1.252.537.000	45	%	565.063.788	45	%	45			
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal <b>Dalam Pencitraan Program KKBPK</b>	Persentase Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK			100	%	72.384.000	97	%	70.250.000	97	%	97			
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK			8	Balai	1.080.900.000	8	Balai	399.465.050	100	%	37	12		

	Penyuluhan KKBPK	Jumlah Honorarium Operator			84	Orang/Bulan		84	Orang/Bulan		100	%				
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah waktu pertemuan Rapat-rapat, koordinasi, sosialisasi, perencanaan			12	Bulan	99.253.000	12	Bulan	95.348.738	100	%	96	12		
		Jumlah Honorarium monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian program KKBPK			36	Orang/Bulan		36	Orang/Bulan		100	%				
2	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Terpenuhnya pemberdayaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			100	%	3.422.490.000	79	%	2.697.511.600	79	%	79	100	100	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase terpenuhinya sarana pendukung Operasional PKB/PLKB			100	%	1.105.217.000	56	%	617.909.100	56	%	56			
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga	Jumlah PLKB Non PNS yang menerima honorarium			636	Orang/Bulan	1.592.473.000	636	Orang/Bulan	1.354.802.500	100	%	85			

	Berencana (PKB/PLKB)															
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyuluhan program KKBPK			151	Orang	724.800.000	151	Orang	724.800.000	100	%	100			
3	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat dan kontrasepsi</b>			100	%	52.162.000	23	%	12.000.000	23	%	23			
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes/Klinik KB yang menerima distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi			24	Faskes	52.162.000	12	Faske s	12.000.000	50	%	23			

4	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat a n Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	Persentase terpenuhinya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah			100	%	650.074.000	71	%	461.360.000	71	%	71			
	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			1750	Akseptor	33.850.000	0	Akseptor	33.850.000	0	%	100			
		Jumlah Honorarium Operator			24	Orang / Bulan		24	Orang / Bulan		100	%				
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pengelolaan program KKBPK di kampung KB			8	Kampung KB	616.224.000	8	Kampung KB	427.510.000	100	%	69			
	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan</b>				100	%	869.700.000	100	%	773.270.000	100	%	89			

	Keluarga Sejahtera (KS)														
		Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga													
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				100	%	869.700.000	89	%	773.270.000	89	%	89	12	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapatkan sarana kegiatan			6	Kelompok	220.000.000	10	Kelompok	213.300.000	167	%	97	25	

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pada kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1	Kelompok	649.700.000	1	Kelompok	559.970.000	100	%	86			
		Jumlah Honorarium Petugas Operator			36	Orang/Bulan		36	Orang/Bulan		100	%				
<b>Jumlah</b>							<b>10.553.994.592</b>			<b>8.619.231.198</b>						



Dari Tabel 2.1, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 .

- a. Evaluasi terhadap Pencapaian Target Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebanyak 5 program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebanyak 4 program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dari Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebanyak 4 program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebanyak 3 program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis

- b. Evaluasi Keuangan Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021 dialokasikan dalam memperlancar tugas dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Rp 158.224.126.923,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh enam Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) Anggaran Terealisasi pertgl 31 Desember 2021 sebesar Rp. 140.606.357.634 (*Seratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Enam Juta Tiga ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah* atau 88,87% dari total pagu.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Rp 10.553.994.592 (*Sepuluh milyar Seratuslimapuluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) Anggaran Terealisasi pertgl 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.619.231.198 (*Delapan Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua ratus Tiga puluh satu Seratus Sembilan Puluh Delapan*) atau 81,7% dari total pagu

Capaian program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Capaian Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara**  
**Tahun Anggaran 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>58.727.905.646</b>	58.024.887.558	98,80
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>89.372.601</b>	72.435.000	81,05
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.372.601	72.435.000	81,05
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>51.043.087.679</b>	50.684.084.465	99,30
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.043.087.679	50.684.084.465	99,30
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.	-	-
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.063.769.725</b>	1.017.585.025	95,66
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.997.188	24.739.762	98,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.403.799	267.820.259	99,04
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.992.985	65.949.113	99,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.498.638	27.149.550	98,73
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.248.529	84.973.298	96,29
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.020.000	15.010.000	99,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571.608.586	531.943.043	93,06
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.739.290.641</b>	1.654.650.000	95,13
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	1.687.240.350	1.602.650.000	94,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000	51.000.000	100,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.050.291	1.000.000	95,21
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.032.750.000</b>	<b>3.860.864.654</b>	<b>95,74</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.107.800.000	1.039.533.800	93,84
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.684.000	203.792.460	96,73
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.714.266.000	2.617.538.394	96,44
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>559.635.000</b>	<b>537.266.414</b>	<b>96,00</b>
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.420.000	107.158.241	96,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	448.215.000	430.108.173	95,96
<b>8</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>200.000.000</b>	<b>198.002.000</b>	<b>99,00</b>
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dinas Kesehatan)	200.000.000	198.002.000	99,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>89.340.728.624</b>	<b>72.950.926.497</b>	<b>81,65</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.445.828.102</b>	<b>23.148.822.327</b>	<b>87,53</b>
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	788.000.000	772.770.209	98,07
	Pengembangan Rumah Sakit	3.002.229.870	1.737.724.223	57,88
	Pengembangan Puskesmas	64.660.723	64.266.500	99,39
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	482.250.000	479.717.000	99,47
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	527.350.000	412.228.000	78,17
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.829.031.123	5.541.602.052	95,07

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.007.659.971	5.926.797.726	84,58
	Pengadaan Obat, Vaksin	4.082.304.286	3.769.065.104	92,33
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.172.735.129	3.959.009.513	94,88
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	303.600.000	302.035.000	99,48
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114.380.000	111.980.000	97,90
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	71.627.000	71.627.000	100,00
<b>2</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>62.216.978.922</b>	<b>49.184.699.170</b>	<b>79,05</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	624.979.681	616.741.200	98,68
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	2.513.239.800	2.194.477.000	87,32
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	151.905.000	148.905.000	98,03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	712.090.000	710.890.000	99,83
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	273.432.415	267.512.500	97,83
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	26.221.086	26.212.000	99,97
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	171.465.000	169.665.000	98,95
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	213.401.672	122.850.000	57,57
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	64.585.000	64.585.000	100,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	4.922.862.352	3.735.659.858	75,88
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	2.476.216.631	2.340.812.810	94,53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	667.936.651	666.410.300	99,77
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	182.851.073	162.118.800	88,66
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	350.551.827	349.266.700	99,63
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	708.905.379	703.526.379	99,24
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	113.642.000	62.195.000	54,73
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinas Kesehatan)	112.725.000	112.725.000	100,00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.475.379.496	1.442.224.814	97,75
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.225.439.895	27.418.807.804	87,81
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.939.500.248	4.349.552.750	39,76
	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.354.247.000	3.070.311.255	91,54
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	434.926.716	405.750.000	93,29
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	455.775.000	-	-
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	44.700.000	43.500.000	97,32
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>199.696.600</b>	198.320.000	99,31
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	199.696.600	198.320.000	99,31
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>478.225.000</b>	419.085.000	87,63

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)	478.225.000	419.085.000	87,63
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>9.102.167.407</b>	<b>8.714.055.000</b>	<b>95,74</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.823.700.000</b>	<b>8.439.525.000</b>	<b>95,65</b>
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.851.700.000	<b>7.719.525.000</b>	98,32
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	972.000.000	720.000.000	74,07
<b>2</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>278.467.407</b>	<b>274.530.000</b>	<b>98,59</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	278.467.407	274.530.000	98,59
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>182.464.481</b>	<b>152.459.000</b>	<b>83,56</b>
<b>1</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, TokoAlat Kesehatan dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT)</b>	<b>17.963.975</b>	<b>14.695.000</b>	<b>81,80</b>
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	17.963.975	<b>14.695.000</b>	81,80
<b>2</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>101.019.892</b>	<b>80.914.000</b>	<b>80,10</b>

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	101.019.892	80.914.000	80,10
3	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	63.480.614	56.850.000	89,55
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Dinas Kesehatan)	63.480.614	56.850.000	89,55
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	870.860.756	764.029.580	87,73
1	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	244.460.756	137.629.580	56,30
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	244.460.756	137.629.580	56,30
2	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	626.400.000	626.400.000	100,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	626.400.000	626.400.000	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>158.224.126.914</b>	<b>140.606.357.634</b>	<b>88,87</b>

**Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Batu Bara  
Tahun Anggaran 2021**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>4.271.031.592</b>	<b>4.074.025.810</b>	<b>95</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.537.650.867</b>	<b>3.447.834.611</b>	<b>97</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.537.650.867	3.447.834.611	97
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>220.060.725</b>	<b>209.995.334</b>	<b>95</b>
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	94.574.324	90.910.613	96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.986.401	19.639.100	98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	14.810.000	74
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.500.000	84.635.621	99
3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>303.400.000</b>	<b>293.506.001</b>	<b>97</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.000.000	78.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000	39.106.001	80
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>176.400.000</b>	<b>176.400.000</b>	<b>100</b>
4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>209.920.000</b>	<b>122.689.864</b>	<b>58</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.300.000	88.268.864	50
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.620.000	14.440.000	99
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.981.000	100

B	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>100</b>
1	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>100</b>
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	36.000.000	36.000.000	<b>100</b>
C	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>5.377.263.000</b>	<b>3.735.935.388</b>	<b>69</b>
1	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.252.537.000</b>	<b>565.063.788</b>	<b>45</b>
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	72.384.000	70.250.000	<b>97</b>
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.080.900.000	399.465.050	<b>37</b>
	Pengendalian Program KKBPK	99.253.000	95.348.738	<b>96</b>
2	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>3.422.490.000</b>	<b>2.697.511.600</b>	<b>79</b>
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.105.217.000	617.909.100	<b>56</b>
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.592.473.000	1.354.802.500	<b>85</b>
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	724.800.000	724.800.000	<b>100</b>
3	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.162.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>23</b>

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	52.162.000	12.000.000	23
4	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>650.074.000</b>	<b>461.360.000</b>	<b>71</b>
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	33.850.000	33.850.000	100
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	616.224.000	427.510.000	69
D	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>869.700.000</b>	<b>773.270.000</b>	<b>89</b>
1	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>869.700.000</b>	<b>773.270.000</b>	<b>89</b>
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	220.000.000	213.300.000	97
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	649.700.000	559.970.000	86
	<b>Jumlah</b>	<b>10.553.994.592</b>	<b>8.619.231.198</b>	<b>82</b>

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 belum mencapai 100% dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak dilaksanakannya survei akreditasi Puskesmas oleh karena masa Pandemi Covid-19
2. Adanya selisih harga di Pagu anggaran dengan realisasi anggaran.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - 2) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
  - 3) Subkoordinator Program dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
  - 1) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2) Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
  - 1) Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
  - 1) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:

- 1) Subkoordinator Kefarmasian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2) Subkoordinator Sarana dan Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- 1) Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2) Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Tugas dan Fungsi**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas membantu Bupati Batu Bara melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Batu Bara.

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

**Tabel. 2.3**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Batu Bara Tahun 2021**

N O	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Akses Kesehatan	Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan	%		50	55%	57%	60%	68,57	81.37	81	82	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Utama	Faskes		1	5	6	7	1	1	6	7	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Madya	Faskes		8	8	5	6	8	8	5	6	
		Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Nasional	%	95	78	85	80	81	77,9 %	74,19	80	81	
		Rasio Puskesmas	Pusk / Jmlh Pddk			1/30.000 pddk			1.08/30.000				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90	95	100	---	80,94	95	100	
2	Kualitas Layanan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	217/100000 KH	117/100.000	117/100.000	93/100.000	89/100.000	81/100.000 KH	50,48/100.000 KH	50,48/100.000 KH	50,48/100.000 KH	
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	Per 1.000 KH	12,2	10/1.000	9/1.000	2,6/1.000	2,51.000	3.1/1.000 KH	2,27/1000 KH	2,27/1000 KH	2,27/1000 KH	

	Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000 KH	19,5	10/1.000	9/1.000	2,8/1.000	2,7/1.000	3,2/1.000 KH	2,27/1.000 KH	2,27/1.000 KH	2,27/1.000 KH	
		Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	1.000 KH		10/1.000	9/1.000	2,3/1.000	2,2/1.000	0	0	0	0	
		Prevalensi Balita Stunting	%	21,1	<13	<12	6,5	6	7,45	3,24	3,24	3,24	
		Persentase Penemuan kasus TBC yang diobati sesuai standar	%		25	30%	31%	32%	39,4	36,8	36,8	36,8	
		Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence)	Per 1000 Pddk	<1	<1	<1	0,99	0,98	1,22	2,19	1,22	0,98	
		Angka Kesakitan DBD	Per 100.000 pddk	49/100.000	47/100.000	45/100.000	43/100.000	40/100.000	9,9/100.000 pddk	16,43/100.000 Pddk	16,43/100.000 Pddk	16,43/100.000 Pddk	
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	%		92	93%	94%	95%	92%	88,07	94%	95%	
3	Meningkatkan kesadaran dan Peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS	%	50	30	40%	60%	61%	28,47	29,8	60%	61%	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	



Berdasarkan tabel 2.3 diatas terdapat beberapa indikator yang belum dan telah mencapai mencapai target kinerja yaitu :

A. Indikator yang belum memenuhi target kinerja

1. Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Utama dan Madya

Realisasi Indikator Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Utama di tahun 2021 belum mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Startegis, dimana realisasi indikator ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya masih tetap satu fasyankes, dari target yang ditetapkan sebesar 5 fasyankes sehingga capaian kinerjanya mencapai 20 %. Sedangkan Realisasi Indikator Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Madya di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Startegis, dimana realisasi indikator ini 8 fasyankes dari target yang ditetapkan sebesar 8 fasyankes sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 % Faktor kegagalan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Utama karena adanya pandemik COVID 19. Sehingga survey akreditasi puskesmas tidak dilakukan. Sedangkan Indikator Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Madya tercapai dikarenakan fasyankes yang terakreditasi madya di tahun sebelumnya sudah mencapai 8 fasyankes.

Alternatif solusi yang telah dilakukan melaksanakan kegiatan yang menunjang akreditasi dilaksanakan sesuai protokol Kesehatan.

2. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Realisasi Indikator Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2021 belum mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 74,19% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya mencapai 92,73%.

Faktor kegagalan Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2021 adalah dikarenakan sebagian masyarakat belum menyadari penting Jaminan Kesehatan Nasional.

Alternatif solusi yang telah dilakukan meningkatkan promosi tentang pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional terhadap masyarakat yang belum memiliki JKN.

Jumlah peserta JKN/KIS Tahun 2021 dengan jumlah penduduk 425.831 jiwa (dengan jumlah penduduk miskin 412.638 jiwa)

- a. PBI APBN 162.146 Jiwa
- b. PBI APBD Provsu 8.666 jiwa
- c. PBI APBD Kab.Batu Bara 15.144 jiwa
- d. Non PBI 63.192 Jiwa

### 3. Angka Kesakitan malaria (*Annual Paracite Incidence/API*)

Realisasi Indikator Angka Kesakitan malaria (*Annual Paracite Incidence/API*) di tahun 2021 belum mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Startegis, dimana realisasi indikator ini sebesar 2,19 dari target yang ditetapkan sebesar <1 sehingga capaian kinerjanya mencapai -19% .

Faktor Penyebab peningkatan *Annual Paracite Incidence* (API) Kabupaten Batu Bara dikarenakan tempat perindukan nyamuk *Anopheles* semakin bertambah. Alternative solusi *Annual Paracite Incidence* (API) tahun anggaran 2022 melakukan kerjasama dengan OPD terkait untuk mengurangi tempat perindukan nyamuk seperti Dinas PU, PMD dan OPD terkait lainnya , melakukan penyemprotan dinding rumah, melakukan *Mass Blood Survey* (MBS) suatu upaya pencarian dan penemuan penderita yang dilakukan melalui survey **malaria** didaerah endemis **malaria** tinggi yang penduduknya tidak lagi menunjukkan gejala spesifik **malaria** serta melakukan pembagian kelambu.

### 4. Persentase Desa/Kelurahan UCI

Realisasi Indikator Persentase Desa/Kelurahan UCI di tahun 2021 belum mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 88,07 dari target yang ditetapkan sebesar 93% sehingga capaian kinerjanya mencapai 94,69%. Realisasi Indikator Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 81,37 % dari target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya mencapai 147,94 %.

Faktor keberhasilan Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 adalah dikarenakan pemenuhan sarana dan prasarana serta pelayanan puskesmas Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk indikator kinerja utama melakukan monitoring dan evaluasi kinerja puskesmas

Solusi alternatif yang dilakukan Kerjasama lintas sektor dan program untuk menggerakkan masyarakat untuk imunisasi

## B. Indikator yang telah memenuhi target kinerja

### 1. Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan

Realisasi Indikator Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Startegis, dimana realisasi indicator ini sebesar 81,37 % dari target yang ditetapkan sebesar 55% sehingga capaian kinerjanya mencapai 147,94 %.

Faktor keberhasilan Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 adalah dikarenakan pemenuhan sarana dan prasarana serta pelayanan puskesmas Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk indikator kinerja utama melakukan monitoring dan evaluasi kinerja puskesmas.

**2. Rasio Puskesmas 1/30.000 pddk**

Realisasi Rasio Puskesmas di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Startegis, dimana realisasi indikator ini sebesar 1,05/30.000 pddk dari target yang ditetapkan sebesar 1/30.000 pddk sehingga capaian kinerjanya mencapai 105

**3. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Realisasi Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen RencanaStartegis, dimana realisasi indikator ini sebesar 50,48/100.000 KH dari target yang ditetapkan sebesar 117/100.000 KH sehingga capaian kinerjanya mencapai 156,8%.

Faktor keberhasilan terlaksananya dengan baik kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas 91,0% (tahun 2020) menjadi 92,90% (tahun 2021)
- b. Pelayanan Jempersal bagi masyarakat kurang mampu & memiliki JKN  
Solusi alternatif yang telah dilakukan adalah
  - a. Pemberian PMT Bumil KEK/Anemia
  - b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur
  - c. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan KesehatanKeluarga dalam Penurunan AKI/AKB
  - d. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kualitas PetugasdalamPelaksanaan ANC Terpadu.

**4. Angka Kematian Neonatal (AKN)**

Realisasi Indikator Angka Kematian Neonatal (AKN) di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 2,14/1.000 KH dari target yang ditetapkan sebesar 9/1.000 KH sehingga capaian kinerjanya mencapai 176,2%.

Faktor penyebab keberhasilan AKN:

- a. Peningkatann pelayanan kesehatan ibu nifas 91,0% (tahun 2020) menjadi 92,90% (tahun 2021)
- b. Pelayanan Jempersal bagi masyarakat kurang mampu & tidakmemiliki JKN.
- c. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan KesehatanKeluarga dalam

#### Penurunan AKI/AKB

- d. Pelaksanaan Pertemuan Konvergensi Pencegahan Stunting Lintas Program dan Lintas Sektor
- e. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Surveilans gizi dalam rangka Penurunan Stunting
- f. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil belum maksimal Solusi

Alternatif yang telah dilakukan adalah

- a. Pemberian PMT Bumil KEK/Anemia
- b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur
- c. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan Kesehatan Keluarga dalam Penurunan AKI/AKB
- d. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas dalam Pelaksanaan ANC Terpadu
- e. Pelaksanaan Pertemuan Konvergensi Pencegahan Stunting Lintas Program dan Lintas Sektor
- f. Pertemuan Penguatan Surveilans gizi dalam rangka Penurunan Stunting

#### 5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 2,7/1.000 KH dari target yang ditetapkan sebesar 9/1.000 KH sehingga capaian kinerjanya mencapai 174%.

Faktor penyebab keberhasilan AKB:

- a. Pelayanan kesehatan bayi lengkap 92,84% (tahun 2021)
- b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur

Solusi alternatif yang telah dilakukan adalah

- a. Pemberian PMT Bumil KEK/Anemia
- b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur
- c. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan Kesehatan keluarga dalam Penurunan AKI/AKB
- d. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas dalam Pelaksanaan ANC Terpadu
- e. Pelaksanaan Pertemuan Konvergensi Pencegahan Stunting Lintas Program dan Lintas Sektor
- f. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Surveilans gizi dalam rangka Penurunan Stunting

## 6. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

Realisasi Indikator Angka Kematian Anak Balita tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 0 dari target yang ditetapkan sebesar 9/1.000 KH sehingga capaian kinerjanya mencapai 200%.

Faktor keberhasilan

- a. Pelayanan kesehatan balita lengkap 91,6% (tahun 2021)
- b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur

Solusi alternatif yang telah dilakukan adalah

- a. Pemberian PMT Bumil KEK/Anemia
- b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur
- c. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan Kesehatan Keluarga dalam Penurunan AKI/AKB
- d. Pelaksanaan Pertemuan Konvergensi Pencegahan Stunting Lintas Program dan Lintas Sektor
- e. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Surveilans gizi dalam rangka Penurunan Stunting
- f. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas dalam Pelaksanaan ANC Terpadu

## 7. Prevalensi Balita Stunting

Realisasi Indikator Prevalensi Balita Stunting di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 3,24% dari target yang ditetapkan sebesar 12% sehingga capaian kinerjanya mencapai 173%.

Faktor keberhasilan dan solusi alternatif yang telah dilakukan adalah

- a. Pemberian PMT Bumil KEK/Anemia
- b. Pemberian PMT Balita Gibur/Gikur
- c. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Mutu Pelayanan Kesehatan Keluarga dalam Penurunan AKI/AKB
- d. Pelaksanaan Pertemuan Konvergensi Pencegahan Stunting Lintas Program dan Lintas Sektor
- e. Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Surveilans gizi dalam rangka Penurunan Stunting
- f. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas dalam Pelaksanaan ANC Terpadu.

**8. Persentase Penemuan Kasus TBC yang diobati sesuai standar**

Realisasi Indikator Persentase Penemuan Kasus TBC yang dilayani sesuai standar di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 36,8% dari target yang ditetapkan sebesar 30% sehingga capaian kinerjanya mencapai 122%.

Faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Pencapaian program sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya penyebaran informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran informasi pemberantasan penyakit TBC harus bekerja sama dengan masyarakat agar ada kepedulian masyarakat terhadap penyakit tbc ini misalnya mengaktifkan atau membentuk kader tbc di desa, melakukan penyuluhan tingkat masyarakat. Semua ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat yang mempunyai gejala penyakit tbc mudah datang ke puskesmas.

Alternative solusi yang telah dilakukan untuk masa pandemik covid saat ini yang biasa dilakukan adalah mengaktifkan surveilans penyakit TBC atau istilahnya jemput bola dimana bila ada laporan masyarakat yang mempunyai gejala penyakit TBC petugas langsung datang. Perlu adanya kepedulian pemerintah desa dalam keterlibatan pemberantasan penyakit TBC misalnya memberikan makanan tambahan atau memperbaiki rumah penderita yang tidak layak karena hampir 50 % penderita TBC adalah masyarakat kurang mampu

**9. Angka Kesakitan DBD**

Realisasi Indikator Angka Kesakitan DBD di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini sebesar 16,43/100.000 pddk dari target yang ditetapkan sebesar 45/100.000 pddk sehingga capaian kinerjanya mencapai 163,48%. Pada masa pandemik covid 2021 saat ini DBD sangat turun dikarenakan mobilisasi masyarakat berkurang

Alternative solusi yang telah dilakukan Kegiatan Angka Kesakitan DBD pemberantasan sarang nyamuk tetap dilakukan masyarakat melalui kader

**10. Nilai AKIP**

Realisasi Indikator Nilai AKIP di tahun 2021 mencapai target yang sudah ditetapkan seperti yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis, dimana realisasi indikator ini adalah B dari target yang ditetapkan adalah B sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

Faktor Keberhasilan melakukan laporan yang kinerja yang berhubungan dengan lakip dibuat secara baik dan benar

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah Kabinet Indonesia Maju telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategi pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu kesehatan Ibu dan anak, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penguatan sistem kesehatan serta pengawasan obat dan makanan. Selain itu, ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan. Ada juga isu kesehatan global yang tengah ramai di Indonesia dan perlu segera ditangani yakni Covid-19 yang mewabah di tingkat global dan telah ditetapkan WHO sebagai *public health emergency and international concern*

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara merumuskan tujuan sebagai berikut : ***Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat***

Selanjutnya untuk mencapai hasil yang optimal maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara merumuskan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut: :

Sasaran :

1. Meningkatkan Akses kesehatan
2. Kualitas Layanan Kesehatan
3. Meningkatkan kesadaran dan Peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
4. Meningkatnya cakupan kesertaan ber-KB
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 1: Meningkatkan Akses kesehatan

Indikator :

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan
2. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Utama
3. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Nasional ( JKN )

Sasaran 2 : Kualitas Layanan Kesehatan

Indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
2. Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Angka Kematian Neonatal (AKN)
4. Angka Kematian Bayi (AKB)
5. Angka Kematian Anak Balita ( AKABA)
6. Prevalensi Balita Stunting
7. Persentase Penemuan Kasus TBC yang diobati sesuai standart
8. Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence ( API )
9. Angka Kesakitan DBD
10. Presentase Desa/kelurahan UCI

Sasaran 3: Meningkatkan kesadaran dan Peranserta masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

Indikator :

1. Persentase Desa/Kelurahan STOP BABS :

Sasaran 4: Meningkatnya Cakupan Kesertaan ber KB

Indikator :

1. Cakupan KB Aktif

Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator :

1. Nilai AKIP

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyusunan rencana pembangunan yang tepat sasaran secara sistematis.
2. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan pembangunan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan serta infrastruktur dalam kerangka RPJPD Kabupaten Batu Bara ;
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan
5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan kawasan/wilayah;
6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang menunjang untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebanyak 6 (Enam) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin pada Dinas Kesehatan kabupaten Batu Bara yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) Program urusan Pemerintah Bidang Kesehatan yang terdiri dari: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan: Program Sediaan Farmasi alat Kesehatan dan makanan dan minuman dan Program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan. Dan Program urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Renja sub unit organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebesar Rp. 135,767,235,467 dan sub unit

organisasi RSUD Batu Bara Rp. 24,144,945,877 sehingga totalnya Rp. 159.912.181.344 bersumber dari dana APBD Kabupaten Batu Bara

Program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan dijabarkan secara rinci pada Tabel 4.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Batu Bara

Adapun target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut: Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 dijabarkan pada table berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Indikator Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatkan Akses Kesehatan	Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan	%	57,0
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Utama	%	31,2
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80,0
2	Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90,0
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 K	50,0
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	Per 1.000 KH	2,2
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	2,2
		Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	0
		Prevalensi Balita Stunting	%	18
		Persentase Penemuan Kasus TBC	%	38
		Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence)	Per 1.000 Pddk	0,99

	Kesehatan	Angka Kesakitan DBD	Per 100.000	43
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	%	94
3	Meningkatkan Kesadaran dan peranserta Masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS	%	60
4	Meningkatnya Cakupan Kesertaan ber KB	Cakupan KB Aktif	%	65,38
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	NILAI	BB

## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diemban.

#### **4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kabupaten**

Memperhatikan arah kebijakan nasional Tahun 2023 dan prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, maka kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara secara tidak langsung mendukung prioritas pembangunan kabupaten Batu Bara namun berperan penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara. Disamping Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara juga memegang peranan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kota) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional Provinsi Sumatera Utara yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **4.2 Rencana Kerja dan Pedanaan**

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara

mempunyai tugas membantu Bupati Batu Bara melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Batu Bara.

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Batu Bara.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										<b>128,495,210,285</b>		<b>151,120,455,480</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>56,719,221,177</b>		<b>62,905,305,980</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>90,999,800</b>		<b>87,000,000</b>
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	90,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			87,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>52,176,912,200</b>		<b>55,700,417,560</b>
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Orang	52,176,912,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			55,700,417,560	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>792,764,877</b>		<b>1,353,558,000</b>
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,743,875				77,000,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	162,036,535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			446,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25,346,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			179,300,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	127,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,770,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	108,987,567	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			108,988,000	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan		318,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				368,500,000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								79,000,000					115,000,000

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit		79,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000	
<b>1 02 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>2,949,412,300</b>				<b>4,158,474,920</b>	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		432,062,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600,000,000	
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan		63,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			199,375,000	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		2,453,605,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,359,099,920	
<b>1 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>630,132,000</b>				<b>835,334,500</b>	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit		84,022,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125,889,500	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit		546,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			709,445,000	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>								<b>70,110,024,058</b>				<b>85,513,465,111</b>	
<b>1 02 02 2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>21,633,208,970</b>				<b>24,135,236,241</b>	
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				15 Unit		19,109,735,050				12,473,729,400	
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit		375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			200,000,000	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket		1,000,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			4,675,000,000	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				2 Paket		1,000,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah			4,084,506,841	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit		131,836,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			462,000,000	
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				15 Paket		16,620,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,000,000	
1 02 02 2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>48,476,815,088</b>				<b>60,828,532,261</b>	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31221 Orang		52,414,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			64,349,683	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					265111 Orang		122,000,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			33,000,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					22380 Orang		32,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			33,000,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					78664 Orang		25,731,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			31,900,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5884 Orang		20,942,166	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			31,900,000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					434 Orang		22,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			31,900,000

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1181 Orang		210,487,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			220,000,000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13718 Orang		65,965,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			55,000,000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen		156,147,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			967,000,000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen		116,248,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			116,253,095	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				87 Dokumen		97,263,164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			306,761,150	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen		178,285,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			146,300,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			90,200,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								190,064,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			190,200,000	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus								233,333,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	309,816,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,920,000
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								14,660,156,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				39,417,762,560
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								33,676,815	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,474,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas								31,733,025,000	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				17,321,596,100
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								100,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				98,340,000
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								48,754,862	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				50,000,000
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>								<b>591,000,000</b>					<b>912,400,000</b>
1 02 03 2.01	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>								<b>9,000,000</b>					<b>88,000,000</b>
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				44,000,000

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>					<b>582,000,000</b>				<b>780,400,000</b>			
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						582,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			650,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					<b>122,765,050</b>				<b>345,906,400</b>				
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>					<b>63,735,050</b>				<b>159,306,400</b>			
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						63,735,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			159,306,400	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>					<b>59,030,000</b>				<b>50,000,000</b>			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						59,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			50,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					<b>952,200,000</b>				<b>1,443,377,989</b>				
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>952,200,000</b>				<b>952,200,000</b>			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				952,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			952,200,000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										<b>7,272,025,182</b>				<b>10,602,208,400</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>									<b>7,272,025,182</b>				<b>6,625,893,400</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>									<b>6,314,905,182</b>			<b>1,954,991,000</b>
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						102,572,682	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,375,000	



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0001 RSUD Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										<b>24,144,945,877</b>		<b>26,772,633,095</b>		
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>4,364,625,380</b>		<b>14,252,930,000</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>1,166,127,380</b>		<b>815,000,000</b>
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		151,201,146				60,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		199,510,535				200,000,000
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		489,610,397				200,000,000
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		59,000,000				50,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		131,805,302				120,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen		20,000,000				15,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan		115,000,000				170,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>2,910,208,000</b>		<b>2,883,440,000</b>
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		840,000,000				828,000,000
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan		161,368,000				200,000,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		1,908,840,000				1,855,440,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>288,290,000</b>		<b>332,490,000</b>

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0001 RSUD Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit		30,000,000				30,000,000	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit		258,290,000				302,490,000	
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>								<b>11,760,420,497</b>				<b>4,760,413,095</b>	
<b>1 02 02 2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>3,972,840,497</b>				<b>3,844,160,000</b>	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit		1,153,000,000				500,000,000	
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit		799,280,000				644,160,000	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket		1,000,000,662				1,500,000,000	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				2 Paket		978,895,835				1,000,000,000	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit		41,664,000				200,000,000	
<b>1 02 02 2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>7,787,580,000</b>				<b>916,253,095</b>	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen		57,580,000				116,253,095	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen		30,000,000				50,000,000	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								200,000,000				200,000,000	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Batu Bara**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.16.0001 RSUD Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capalan Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capalan Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capalan Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								7,500,000,000					550,000,000
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>								<b>8,019,900,000</b>				<b>7,759,290,000</b>	
1 02 03 2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>								<b>8,019,900,000</b>				<b>7,759,290,000</b>	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								8,019,900,000					7,759,290,000
<b>TOTAL</b>									<b>24,144,945,877</b>				<b>26,772,633,095</b>	



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Catatan Penting**

Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten batu Bara Tahun 2019-2023. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dalam kerangka RAPBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara. Tanpa adanya kerja yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada perundangan yang berlaku.

### **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang staf/aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
  - b. Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang akan dilaksanakan secara triwulanan.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA

Lima Puluh, 4 Februari 2022

